

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di bagian utara Pulau Borneo/ Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Saat ini Brunei dipimpin oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Dimasa pemerintahannya Brunei berhasil mencapai kemerdekaan penuh setelah kurang lebih 145 tahun menjadi negara dibawah protectorat Inggris.

Saat ini Brunei mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Kemajuan ini didukung oleh sumber daya alam berupa minyak dan gas yang dikelola baik oleh pengusaha dalam negeri maupun asing. Demi keberlangsungan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Brunei melaksanakan program penganekaragaman sumber ekonomi dengan menggalakan bidang-bidang industri dan perdagangan. Hasil pengelolaan sumber daya alamnya disalurkan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, subsidi beras dan perumahan.

Eksistensi Brunei di dunia internasional tidak diragukan lagi. Tidak lama setelah mendapatkan kemerdekaannya, Brunei menjadi anggota Assosiation of South East Asian Nation (ASEAN). Sebagai negeri kaum muslimin, Brunei pun bergabung dan menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sebagai negara produsen minyak, Brunei bergabung dalam Asian-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan yang tak kalah penting adalah perhatian Brunei terhadap

negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia, dalam bentuk pemberian pinjaman serta hubungan persahabatan Brunei dengan Amerika.

Stabilitas politik dalam dan luar negeri, kemajuan ekonomi yang pesat, budaya dan mentalitas masyarakat Brunei yang kokoh tidak akan tegak tanpa sebuah pilar yaitu status sebagai negara merdeka. Kemerdekaan menentukan asas bagi sistem pemerintahan yang dijalankan. Kemerdekaan bagi pribumi untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kehidupan bangsa. Kemerdekaan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri demi kebaikan rakyat Brunei di masa depan.

Brunei mendapatkan kemerdekaannya 1 Januari 1984. Kemerdekaan yang diraih bukan semata-mata berkat kepemimpinan Sultan Bolkiah, tapi juga berkat kepemimpinan sultan sebelumnya yaitu Sultan Omar Ali Saifuddin III. Sultan Omar Ali Saifuddin III tidak membiarkan kerajaannya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial Inggris saja. Lebih dari itu, dari awal pemerintahannya diwarnai oleh berbagai kebijakan yang berkontribusi besar bagi masa depan Brunei yang lebih baik, salah satunya adalah kemerdekaan.

Dalam buku yang ditulis Haji Abdul Latif Haji Ibrahim dijelaskan bahwa Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ingin melihat Brunei menjadi negara merdeka, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa Brunei sebagai negara kecil yang tidak berupaya untuk dirinya sendiri. Cita-cita besar itu disambut oleh nasionalisme rakyat Brunei yang mulai tumbuh dengan melihat usaha kemerdekaan negara tetangga khususnya Indonesia.

Bagi Sultan Omar Ali Saifuddin III, kemerdekaan adalah harga mutlak, sehingga Brunei Darussalam harus dipersiapkan dan dirancang menuju kemajuan politik dan sosial "sejajar dengan arus perubahan yang sedang melanda bumi nusantara" (Ahmad, Zaini Haji, 2004: 38). Salah satu kemajuan politik yang ingin dicapai adalah mewujudkan sistem demokrasi berparlemen dalam pemerintahan Brunei. Namun, sultan ingin kemajuan itu terjadi secara berangsur-angsur tapi pasti. Seperti yang dikutip oleh Haji Zaini Haji Ahmad (Haji Zaini Haji Ahmad, 2004:38) dari buku Ranjit Singh berjudul *The Problems of Political Survive 1839-1963* "...he (Sultan) embarked on a slow programe designes to give Brunei parliamentary democracy..." (Haji Zaini Haji Ahmad, 2004: 38).

Proses pembaharuan menuju negara merdeka yang demokratis dalam sebuah identitas Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu adalah sebuah kebijakan yang kontroversial. Disatu sisi, dengan prinsip kebebasan berpendapat, sultan harus memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demi menciptakan perubahan kearah yang lebih baik. Disisi lain, prinsip bahwa perubahan harus dari atas (sultan) ke bawah (rakyat) telah melekat dalam sistem pemerintahan monarki yang dianut negara Brunei. Kontroversial itu menjadi alasan penting bagi penulis untuk mengangkat proses berpadunya sistem demokrasi dengan sistem monarki dalam tubuh Kesultanan Brunei masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III sehingga menciptakan dinamika politik dalam negeri yang unik.

Adapun dasar pemikiran lain yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dinamika politik dalam negeri Kesultanan Brunei Darussalam masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III adalah sebagai berikut:

1. Sultan Omar Ali Saifuddin III membawa Brunei pada dinamika politik dalam negeri yang baru dan lebih hidup dibandingkan dengan dinamika politik dalam negeri yang terjadi pada masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Pemerintahan sultan-sultan pada pertengahan abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 adalah pemerintahan yang penuh dengan penerimaan berbagai perjanjian yang puncaknya adalah kemenangan perang pertahanan politik pemerintahan Inggris atas Brunei melalui perjanjian 1906. Sehingga "From 1906 to the beginning of the Second World War, the question of Brunei's political survival remained in hibernation..." (Singh, D.S. Ranjit, 1984: 106). Sultan tidak memiliki kekuasaan apapun karena semua saran pemerintahan Inggris melalui perwakilannya di Brunei harus diambil dan dilaksanakan. Secara permukaan, Sultan Omar Ali Saifuddin III mengambil dan melaksanakan saran pemerintahan kolonial untuk menerapkan demokrasi. Namun, sultan menggunakan celah yang terdapat dalam demokrasi itu sendiri untuk tetap memelihara falsafah Melayu Islam Beraja.
2. Dua sistem yang bertentangan yaitu Demokrasi dan Monarki dapat hidup secara bersamaan dalam masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin. Salah satu instrumen penting demokrasi yaitu pemilu, dapat dilaksanakan dengan bersih dan kompetitif. Namun, ketika para perwakilan rakyat terpilih duduk dalam parlemen, suara mereka terkendala suara para penguasa.

3. Jiwa zaman ketika masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin adalah tidak ada reformasi jika tidak ada demokrasi. Hal ini tidak berlaku bagi Kesultanan Brunei, karena sistem apapun yang mampu memberikan kebaikan bagi rakyat Brunei, maka itulah yang akan diterapkan. Pemerintah Brunei yakin bahwa Melayu Islam Beraja adalah falsafah kehidupan yang sesuai dengan jiwa masyarakat Brunei dan akan membawa kebaikan.
4. Keberadaan Partai Rakyat Brunei (PRB) yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai tata kenegaraan dengan sultan, memiliki pengaruh yang cukup kuat ditengah-tengah rakyat Brunei dan partai-partai politik diluar Brunei serta memiliki pandangan yang berbeda mengenai proses demokratisasi menjadi tantangan tersendiri bagi Sultan Omar Ali Saifuddin III dalam menentukan arah politik kerajaannya.
5. Konsep “Beraja” dalam falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sangat mempengaruhi corak politik dalam negeri dan perjalanan demokrasi dalam Kesultanan Brunei Darussalam. Definisi Beraja tercantum Proklamasi Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, yaitu sebagai berikut:

Beraja didefinisikan sebagai sistem kerajaan atau pemerintahan yang (mempunyai) raja yang wajib diterima dan ditaati. Raja dalam konteks MIB adalah Sultan yang senantiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh ke depan raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan dan pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah, kerana kuasa memerintah itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wata'ala. (Haji Abdul Aziz dalam Haji Abdul Latif Haji Ibrahim, 2003:170).

Ternyata, konsep “Beraja” inilah yang menjadi pegangan ketika kehidupan politik dalam negeri Brunei Darussalam tergoncang.

Maka dengan beberapa pertimbangan diatas, penulis menuliskannya dalam bentuk skripsi berjudul "Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)".

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana dinamika politik dalam negeri Kesultanan Brunei Darussalam masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III?"

Masalah dirinci kedalam tiga pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah dasar dari kebijakan pembaharuan politik dalam negeri Sultan Omar Ali Saifuddin III?
2. Bagaimanakah proses pembaharuan politik dalam negeri Kesultanan Brunei Darussalam masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III?
3. Bagaimana reaksi dari partai politik terhadap pembaharuan politik dalam negeri masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tujuan menjadi dua bagian yaitu yang bersifat umum dan khusus. Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah perbendaharaan penulisan sejarah kawasan Asia tenggara khususnya politik dalam negeri Brunei Darussalam masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967) melalui studi literatur, karena dalam

sebuah literatur dituliskan bahwa disadari atau tidak kajian tentang Brunei baik bidang sejarah, ekonomi, sains, pendidikan, bidang budaya tidak begitu banyak. Hal ini karena terhalangnya akses kepada sumber informasi dengan alasan data atau informasi mengenai hal-hal yang akan dijadikan kajian masih dirahasiakan.

Sedangkan, secara khusus tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Menjelaskan dasar kebijakan pembaharuan politik dalam negeri Sultan Omar Ali Saifuddin III.
2. Menjelaskan proses pembaharuan politik dalam negeri masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III.
3. Menjelaskan respon partai politik terhadap pembaharuan politik dalam negeri masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III.

D. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam mengkaji “Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)”, penulis menggunakan metode historis. Menurut Louis Gottschalk (1975: 32) metode historis adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal senada diungkapkan pula oleh Ismaun (2001: 125) bahwa metode sejarah adalah prosedur kerja sejarawan yang terdiri dari mencari jejak-jejak masa lampau, meneliti jejak-jejak secara kritis, berusaha membayangkan bagaimana gambaran masa lalu dan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif.

Merujuk dari pendapat Ismaun (2001: 125-131) maka dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan empat tahap penting, yaitu sebagai berikut:

a. Heuristik

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan “Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)”. Sumber-sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber tertulis yang berupa arsip, buku, artikel dan sumber lainnya yang dinilai relevan dan mendukung.

b. Kritik dan Analisa Sumber

Pada tahap ini penulis mencoba untuk menilai dan mengkritisi sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sumber-sumber yang ditemukan tersebut asli atau tiruan, relevan atau tidak relevan dengan permasalahan yang penulis kaji. Dalam melakukan penilaian sumber sejarah, penulis melihatnya dari 2 aspek yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Pada tahap ini pun penulis berusaha untuk mengkritisi sumber-sumber sejarah tentang “Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin (1950-1967)”.

c. Interpretasi

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk mencari hubungan antara berbagai fakta tentang “Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam

Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)”. Dari fakta-fakta yang didapat kemudian penulis menafsirkan fakta-fakta tersebut dengan menggunakan pendekatan politik.

d. Historiografi

Tahap historiografi ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan dianalisis dan ditafsirkan oleh penulis. Kemudian ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)”.

2. Teknik Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan skripsi, penulis menempuh teknik penelitian. Teknik penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh data. Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur.

Pada teknik studi literatur ini penulis mencari, membaca serta meneliti sumber-sumber tertulis berupa arsip, buku, artikel dan sumber relevan lainnya yang ada hubungannya dengan “Dinamika Politik Politik Dalam Negeri Kesultanan Brunei Darussalam Masa Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967)”.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari latar belakang masalah penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyoroti kajian politik tentang Brunei Darussalam yang dilakukan oleh peneliti lain dan prosedur yang mereka tempuh. Menjelaskan pula hasil-hasil penelitian atau temuan dalam bidang yang penulis teliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang rangkaian serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang sedang penulis kaji.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang dasar pembaharuan politik dalam negeri Sultan Omar Ali Saifuddin III, proses pembaharuan politik dalam negeri Brunei Darussalam dan respon partai politik terhadap pembaharuan dalam negeri Brunei masa Sultan Omar Ali Saifuddin III.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.